

DRAFT TESIS

**PROSES PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
MEMASUKI USIA 25 TAHUN DI KOTA PADANG**



OLEH:

**RAHMADONA PUTRI
1420123068**

Telah disetujui oleh pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Yaswirman, MA
NIP. 19570801198603001**

**Dr. Sukanda Husin, SH.,LLM
NIP. 195704221986031002**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PROSES PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MEMASUKI USIA 25 TAHUN DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 63 ayat (5) UUNJP menyebutkan bahwa : Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD). Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1) Bagaimana proses penyimpanan protokol notaris yang telah memasuki umur 25 tahun di Kota Padang? 2) Bagaimana Tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol yang diterima? 3) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih?. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyimpanan protokol notaris yang telah memasuki umur 25 tahun. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol yang diterima. 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, sementara untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara dengan menggunakan metode semi terstruktur masalah penelitian kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahan utama dari penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara di Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Data Sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana di Kota Padang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya membuat rencana kerja dan bisa melaksanakan perintah undang-undang untuk tidak menyerahkan protokol yang telah berusia 25 tahun kepada Notaris lain dan MPD hendaknya mendirikan kantor tetap.

Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah

THE NOTARY PROTOCOLS STORAGE PROCESS THAT HAVE ENTERED 25 YEARS IN PADANG CITY

ABSTRACT

Public Notary is a public officier who is authorized to make an authentic deed and other authority as stipulated in the law No 2 of 2014 on the Amandments to the Law No 3 of 2004 on Public Notaries official. Article 63 (5) of the Public Notary Law mentions that of the Notary protocol of which age is 25 years or more must be submitted another Public Notary then to MPD. Based on that, the problem are: (1) how the Notary protocols storage process that have entered 25years in Padang City? (2) how responsibility that receiver Notary protocol to accepted Notary protocols? (3) what are the obstacles of Notary protocol storage process that have entered 25 years or more? So the purposes of this research based on the problem above are:(1) to know and analyze the Public Notary storage process protocols that have entered 25 years. (2) to know the responsibility of the receiver Notary protocol to the accepted protocols. (3) to know the obstacles of Notary protocol storage process that have entered 25 years or more. This research is descriptive analysis that use empirical judicial approach. It also do interview with a semi-structured method of research problem to the supervision assembly area in Padang city and the Public Notary of Land Deed (PPAT). The secondary data from primary legal material, secondary and tertiary are using qualitative data that presented in descriptive. The result of this research show that the Notary protocol storage process that have entered 25 years is not done in Padang City. Because it does not comply with Article 63(5). The suggestion based on the result of this research is the supervision assembly area should make a work plan and do the instruction of the law that not give the protocol which have entered 25 years to another Public Notary and they should build an office for it.

Keyword: Public Notary. Notary protocol. Supervision assembly area.

